

PENGARUH PENATAUSAHAAN ASET TETAP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

“Studi Kasus pada BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat”

Baiq Reinelda Tri Yunarni¹ Handoyo Wirastomo²

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram¹

Universitas Muhammadiyah Mataram²

Article Info	Abstract
<p>Article history: Received : 16 Januari 2022 Publish : 20 Januari 2022</p> <hr/> <p>Keywords: Administrasi Aktiva Tetap, Kualitas Laporan Keuangan</p>	<p><i>This study aims to find empirical evidence in support of the hypothesis that there is an effect of fixed asset administration consisting of bookkeeping, inventory and reporting on the quality of financial reports (a case study at Bappeda West Lombok Regency). The method used in this research is quantitative method. With data analysis techniques using the help of the SPSS application program which includes validity, reliability, multiple linear regression analysis and coefficient of determination as well as hypothesis testing consisting of partial test or t test and simultaneous test or f test. The sample determination uses a non-probability sampling technique, namely the saturated sample method. Data collection is carried out through direct observation and surveys are carried out by distributing questionnaires to respondents. This study uses a multiple linear regression analysis model with SPSS 20 software. This study proves that there is a significant influence between the administration of fixed assets on the quality of financial reports at Bappeda West Lombok Regency.</i></p>
<p>Info Artikel</p> <p>Article history: Diterima: 16 Januari 2022 Terbit: 20 Januari 2022</p>	<p>ABSTRAK</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris yang mendukung hipotesis bahwa terdapat pengaruh administrasi aktiva tetap yang terdiri dari pembukuan, persediaan dan pelaporan terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus di Bappeda Kabupaten Lombok Barat). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Dengan teknik analisis data menggunakan bantuan program aplikasi SPSS yang meliputi uji validitas, reliabilitas, analisis regresi linier berganda dan koefisien determinasi serta pengujian hipotesis yang terdiri dari uji parsial atau uji t dan uji simultan atau uji f. Penentuan sampel menggunakan teknik non-probability sampling yaitu metode sampel jenuh. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan survei dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda dengan software SPSS 20. Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penatausahaan aktiva tetap terhadap kualitas laporan keuangan pada Bappeda Kabupaten Lombok Barat.</p>

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Baiq Reinelda Tri Yunarni

Universitas Muhammadiyah Mataram

Email: reinelda.yunarni@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Salah satu manifestasi pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang menjadi tuntutan masyarakat adalah terwujudnya suatu sistem pengelolaan kekayaan daerah yang memadai, informative, transparan, dan akuntabel (Suwanda, 2015). Koridor pengelolaan barang milik daerah harus digunakan semaksimal mungkin mendukung kelancaran tupoksi pelayanan, dan memberikan manfaat kontribusi penerimaan bagi daerah. Pengelolaan barang milik daerah adalah bagian dari suatu sistem, yakni sistem akuntansi yang merupakan dari sistem informasi manajemen, sistem ini direncanakan untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pihak luar maupun dalam organisasi. Barang milik daerah (BMD) merupakan salah satu asset yang paling vital yang dimiliki daerah guna menunjang operasional jalannya pemerintah daerah. hal ini disebabkan dengan adanya barang milik daerah maka pencapaian pembangunan nasional dapat terlaksana guna kesejahteraan masyarakat pada

umumnya dan masyarakat daerah khususnya. Oleh karena itu, barang milik daerah harus dikelola dengan baik dan benar sehingga terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang transparan, efisien, akuntabel, ekonomis serta menjamin adanya kepastian nilai.

Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara/daerah merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara. Undang-Undang (UU) No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pertanggungjawaban atas barang milik daerah kemudian menjadi sangat penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan rapor pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan amanat yang dipercayai rakyat, utamanya yang terkait dengan penggunaan anggaran juga kepada stakeholder lainnya (lembaga donor, dunia usaha dan lain-lain). Atas LKPD tersebut juga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan dan memberikan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan.

Aset yang berada dalam pengelolaan pemerintah daerah tidak hanya yang dimiliki oleh pemerintah daerah saja, tetapi juga termasuk asset pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam rangka pelayanan atau pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Pengelolaan asset daerah harus ditangani dengan baik agar asset tersebut terdapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Namun jika tidak dikelola dengan semestinya, asset tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari asset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan juga turun nilainya seiring dengan waktu.

Penatausahaan menghasilkan dokumen yang digunakan sebagai bukti untuk mencatat transaksi dalam proses akuntansi meliputi semua dokumen yakni barang semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, yang berada dalam pengelolaan barang. Selain itu, barang milik daerah pada umumnya akan dicantumkan dalam laporan keuangan khususnya didalam neraca pemerintah daerah, yang apabila tidak dikelola dengan efektif dan efisien akan menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan akan merugikan daerah tersebut, sehingga tata kelola yang baik dalam unsur pemerintahan tidak terlaksana. Untuk menunjang tata kelola baik, pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan dengan baik mulai pada saat perencanaan dan penganggaran barang milik daerah hingga penatausahaan barang milik daerah itu sendiri.

Laporan keuangan pemerintah daerah yang disajikan menunjukkan akuntabilitas pemerintah atas pengelolaan sumberdaya-sumberdaya yang dipercayakan oleh rakyat haruslah memenuhi kualitas yang diinginkan, yaitu : (a) Laporan keuangan harus mempunyai informasi yang relevan, antara lain: memiliki umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu dan lengkap (b) Laporan keuangan harus mempunyai informasi yang andal , antara lain: penyajian jujur, dapat diverifikasi dan netralitas (c) Laporan keuangan harus mempunyai informasi yang dapat dibandingkan (d) Laporan keuangan harus mempunyai informasi yang dapat dipahami. Pengelolaan aset daerah bukanlah pekerjaan yang mudah, hal ini terbukti dari masih banyaknya pengecualian kewajaran atas nilai asset pemerintah daerah dalam opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah (Sutaryo, 2010).

Laporan Keuangan yang berkualitas menurut *Financial Accounting Standards Board (FASB)* merupakan laporan keuangan yang memenuhi unsur nilai relevan dan reliabilitas. Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik tersebut adalah relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.

Masih banyak barang milik pemerintah daerah yang belum jelas lokasi dan penetapan peruntukannya. Penatausahaan dalam bentuk pengkodean barang sebagai bagian dari

pengelolaan barang milik daerah, haruslah dikoordinir secara profesional, sehingga nantinya akan menghasilkan data yang tepat dan akurat. Laporan hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran tiga tahun terakhir mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian, dan salah satu pengecualiannya adalah pengelolaan aset tetap. Selain itu, para pengelola barang belum memiliki kemampuan tentang tata cara penanganan barang hilang, penyusutan barang daerah serta kode-kode dalam inventarisasi barang. Hal ini dikarenakan penatausahaan dan pelaporan aset tetap masih belum memadai yaitu masih terdapat aset yang dilaporkan dalam pelaporan keuangan dengan rincian aset yang tidak dapat dijelaskan, aset tetap yang tidak dapat dirinci dan belum jelas statusnya, penambahan aset tetap dari belanja modal yang belum didukung rincian aset, aset tetap tidak dapat ditelusuri keberadaannya, aset tetap yang belum mempunyai nilai dan belum disajikan dalam laporan keuangan.. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebagai satu entitas pelaporan pun wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kuantitatif yaitu pendekatan yang menjelaskan nilai suatu variabel dengan mengolah data-data yang ada dalam suatu angka (Sugiyono, 2010). Dalam penelitian ini, sumber data yang menjadi acuan peneliti dan menjadi referensi adalah:

1. Data kuantitatif: yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka sebenarnya (numerik) yang dapat dihitung atau diukur.
2. Data kualitatif: yaitu data yang tidak mempunyai satuan ukur yang umum dan tidak dapat diukur secara langsung.

Subjek penelitian ini dilaksanakan di BAPPEDA Lombok Barat, terletak di Dasan Geres, Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Urusan perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu dari urusan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah No.8 Tahun 2008 tentang urusan pemerintah daerah kabupaten lombok barat. Selanjutnya untuk melaksanakan urusan perencanaan pembangunan daerah dibentuklah kelembagaan perencanaan pembangunan daerah yang berbentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan No.9 Tahun 2008 tentang pembentukan lembaga teknis daerah kabupaten lombok barat. Agar kelembagaan badan perencanaan pembangunan daerah dapat berfungsi, maka ditetapkan peraturan Bupati No.23 Tahun 2008 tentang tugas fungsi pokok, fungsi dan tata cara kerja Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lombok Barat.

Alamat kantor Badan Perencana Pembangunan Daerah kabupaten Lombok barat beralamat di jalan Soekarno Hatta didalam lingkungan kantor Bupati Lombok Barat, terletak disebelah selatan aula kantor bupati lombok barat.

Visi, Misi dan Tujuan BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat

Adapun Visi, Misi dan Tujuan BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat, yaitu:

1. Visi BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, partisipatif dan visioner menuju lombok barat sejahtera.
2. Misi BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat
 - a. Mewujudkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang efektif dan berkualitas.
 - b. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan
 - c. Meningkatkan kualitas sumber daya dan pelayanan umum bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

3. Tujuan BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat
 - a. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.
 - b. Meningkatkan kerjasama kemitraan.
 - c. Meningkatkan kemampuan dan kualitas pengelolaan data dan informasi pembangunan.
 - d. Meningkatkan manajemen dan sistem informasi pengelolaan data dan informasi
 - e. Membina dan mengembangkan kualitas SDM perencan.
 - f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.
 - g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas laporan.

Tugas dan Fungsi (BAPPEDA) Kabupaten Lombok Barat

Tugas Bappeda yaitu melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, monitoring dan evaluasi serta melakukan penelitian dan pengembangan berdasarkan Asas Otonomi Tugas Pembantuan, dan Dekonsentrasi.

Adapun fungsi yang ditetapkan dalam Bappeda Kabupaten Lombok Barat, yaitu:

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, Fisik dan Prasarana, Statistik dan Pealaporan, serta Penelitian dan Pengembangan;
4. Pengkoordinasian perencana diantara SKPD, Lembaga dan Pemerintah Daerah lain;
5. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Gambaran Umum Responden

Pada penelitian ini, telah dilakukan penentuan sebanyak 70 responden sebagai sampel penelitian sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya yaitu berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, dan lamanya masa kerja. Namun untuk memperjelas gambaran umum responden yaitu karyawan pada Bappeda Kabupaten Lombok Barat, maka selain pada kriteria diatas juga meliputi jenis kriteria yang tidak di masukkan oleh responden yang menurut pribadi peneliti responden itu layak sebagai responden. Dari proses penyebaran kuesioner kepada 70 orang responden yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini, maka diperoleh statistik sebagai berikut.

Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, maka klasifikasi responden berdasarkan data yang diolah dapat dilihat pada tabel berikut:

Data responden berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase
1.	Perempuan	30	43%
2.	Laki-Laki	40	57%
Jumlah		70	100

Sumber: *Diolah dari data primer 2020*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah responden perempuan sebanyak 30 orang (40%) dan laki-laki sebanyak 40 orang (60%).

Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan usia, maka klasifikasi responden berdasarkan data yang diolah dapat dilihat pada tabel berikut:

Data responden berdasarkan usia

No	Usia (Tahun)	Jumlah (orang)	Persentase
1.	20-25	11	16%

2.	25-30	22	31%
3.	35-40	30	43%
4.	45-50	7	10%
Jumlah		70	100

Sumber: *Diolah dari data primer 2020*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden berdasarkan tingkat usia adalah antara 35-40 tahun sebanyak 30 orang (43%), usia 25-30 tahun sebanyak 22 orang (32%), usia 20-25 sebanyak 11 orang (15%) dan usia 45-50 tahun sebanyak 7 orang (10%).

Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka klasifikasi responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Data Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1.	Diploma	3	5%
2.	Sarjana	27	38%
3.	Dr / Master	40	57%
Jumlah		70	100%

Sumber: *Diolah dari data primer 2020*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden pada penelitian ini adalah responden yang memiliki pendidikan terakhir Dr/Master dengan frekuensi sebanyak 40 orang (60%) diikuti dengan Sarjana sebanyak 27 orang (38%), dan Diploma sebanyak 3 orang (2%).

Klasifikasi Responden Berdasarkan Lamanya masa kerja

Berdasarkan lamanya masa kerja, maka klasifikasi responden berdasarkan data yang diolah dapat dilihat pada tabel berikut:

Data responden berdasarkan Lamanya masa kerja

No	Masa Kerja (Tahun)	Jumlah (orang)	Persentase
1.	1 Tahun > 5 Tahun	30	43%
2.	5 Tahun > 10 Tahun	40	57%
Jumlah		70	100

Sumber: *Diolah dari data primer 2020*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah lamanya masa kerja responden dari 1 Tahun > 5 tahun sebanyak 30 orang (40%) dan 5 tahun > 10 tahun sebanyak 40 orang (60%).

3.2. Pembahasan

Hasil Uji Regresi Linier berganda

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda diperoleh nilai yang positif yang artinya terdapat pengaruh yang positif antara pembukuan, inventaris dan pelaporan terhadap kualitas laporan keuangan yang ada di bappeda kabupaten lombok barat. Bentuk pengaruh dari persamaan regresi tersebut adalah jika tidak ada penatausahaan aset tetap yang terdiri dari pembukuan, inventaris dan pelaporan maka kualitas laporan keuangan hanya sebesar 6,396. Dan jika setiap kenaikan (karena positif) 1 poin, maka pembukuan, inventaris dan pelaporan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan masing-masing sebesar 0,125 , 0,242 dan 0,266. Dan sebaliknya, jika maka pembukuan, inventaris dan pelaporan turun sebesar 1 poin pada kualitas laporan keuangan maka diprediksi mengalami penurunan sebesar 0,125 , 0,242 dan 0,266.

Hasil Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil uji F (simultan) variabel pembukuan, inventaris dan pelaporan terhadap kualitas laporan keuangan pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$) diperoleh hasil F-hitung = 51,611 yang lebih besar dari F-tabel sebesar 2,744. Ini berarti bahwa variabel pembukuan, inventaris dan pelaporan berpengaruh signifikan secara simultan

terhadap variabel kualitas laporan keuangan (Y). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pembukuan, inventaris dan pelaporan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel kualitas laporan keuangan yang ada di bappeda kabupaten lombok barat.

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan hasil uji t (parsial) variabel pembukuan, inventaris dan pelaporan diperoleh hasil 2,144 , 2,915 dan 2,930 > 1,699 serta nilai signifikan 0,036 , 0,005 dan 0,005 di bawah batas level signifikan sebesar 0,05. Dengan demikian maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya bahwa variabel pembukuan, inventaris dan pelaporan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel kualitas laporan keuangan yang ada di bappeda kabupaten lombok barat.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menggunakan alat pengujian analisis regresi linier berganda, yang merupakan hasil pengolahan dengan bantuan *software* SPSS v.20. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka diperoleh hasil temuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis terhadap hipotesis pertama, variabel pembukuan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lombok Barat, karena diketahui nilai t_{tabel} sebesar 1,669 dan nilai t_{hitung} 2,144 lebih besar dari nilai t_{tabel} .
2. Berdasarkan hasil analisis terhadap hipotesis kedua, variabel Inventaris berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lombok Barat, karena diketahui nilai t_{tabel} sebesar 1,669 dan nilai t_{hitung} 2,915 lebih besar dari nilai t_{tabel} .
3. Berdasarkan hasil analisis terhadap hipotesis ketiga, variabel Pelaporan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lombok Barat, karena diketahui nilai t_{tabel} sebesar 1,669 dan nilai t_{hitung} 2,903 lebih besar dari nilai t_{tabel} .
4. Penatausahaan Aset Daerah yang terdiri dari pembukuan, inventaris, dan pelaporan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lombok Barat, , karena diketahui nilai t_{tabel} sebesar 2,744 dan nilai t_{hitung} 51,611 lebih besar dari nilai t_{tabel} .

Berdasarkan hasil pembahasan dapat dilihat bahwa variabel independen pembukuan, inventaris dan pelaporan berpengaruh positif dan signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap kualitas laporan keuangan dengan tingkat nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) atau kemampuan *variance* nilai variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen adalah sebesar 0,837 atau 83,7%, sedangkan sisanya 16,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis yang diajukan oleh peneliti terbukti.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Ayang Putri Septiayu. 2015. *Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo*. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Anshari, Efrizal Syofyan. 2017 , *pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang*.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999
- Ghozali Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS*,
- Gujarti, *Dasar-dasar Ekonometrika*, Jakarta : Erlangga Jilid 2, 2006
- Mardiasmo, 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi II. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Ikatan Akuntansi Indonesia, *Manajemen Aset Majalah ikatan akuntan indonesia*, 2008
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009
- Pantiyasa, I.P. 2013. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang *standar akuntansi pemerintahan*.
- Reeve, J. *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia Jilid 2*, Jakarta: salemba empat RI, 2010
- S.P Hariningsih, *Sistem Informasi Akuntansi*, Yogyakarta : Ardana Media, 2006
Semarang: Universitas Diponegoro, 2013
- Sirager, Syofian. 2013. *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2012
- Suliyanto, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, 2009
- Sunyoto Danang, *Statistika Deskriptif dan Probabilitas*, Yogyakarta : Tri Admodjo, 2016
- Sutaryo, *Paper manajemen Aset Daerah, 2010*
- Sutaryo, *Paper Manajemen Asset Daerah, 2010*
- Suwanda, *Optimalisasi Pengelolaan Aset PeMda*. Jakarta Jilid III
- Winarno, “*Analisis Ekonometrika dan Statistik dengan Eviews edisi 3*”, Jakarta : YKPN, 2011.